

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DI HUTAN DESA DEPATI JUNJUNG DAN HUTAN KEMASYARAKATAN AIR SELIMANG KABUPATEN KEPAHANG

Freddy Septian¹, Hery Suhartoyo², Priyono Prawito³

¹Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

²Program Studi Budidaya Hutan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

³Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi aspek pengelolaan Hutan Desa (HD) Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, (2) mengetahui hubungan antar aspek pengelolaan Hutan Desa (HD) Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, dan (3) mengukur laju perubahan tutupan lahan di Hutan Desa (HD) Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019 di Desa Taba Padang dan Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang. Evaluasi pengelolaan perhutanan sosial dilakukan secara deskriptif. Analisis hubungan antar aspek pengelolaan perhutanan sosial dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan pada Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang adalah hutan sekunder dan kebun campuran yang tergolong baik secara ekologis. Selama periode 2005 sampai dengan 2019 luas hutan sekunder baik di kawasan Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang mengalami penurunan, sedangkan kawasan kebun campuran mengalami peningkatan luasannya sebesar penurunan luas hutan sekunder. Aspek kelembagaan, perilaku, kinerja/performa, dan sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung memiliki kriteria baik. Aspek kelembagaan, perilaku, dan kinerja/performa pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang memiliki kriteria sedang, sedangkan aspek sosial ekonomi memiliki kriteria baik. Terdapat hubungan yang nyata dengan pola linear positif antar aspek pengelolaan perhutanan sosial yang meliputi kelembagaan, perilaku, performa, kinerja, dan sosial ekonomi baik pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

Kata kunci : Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Aspek Pengelola Pengelola Perhutanan Sosial

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu ekosistem sosial politik yang merupakan arena bagi berbagai kepentingan sumberdaya alam (Cahyono, 2012). Sumber daya hutan menjadi salah satu modal pembangunan, baik dari segi produksi hasil hutan maupun penyangga kehidupan. Sumberdaya hutan berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup utamanya manusia baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekologi (Ruhimat, 2009). Namun demikian, sempitnya areal

perkebunan yang tersedia dan pertumbuhan penduduk terus meningkat menyebabkan masyarakat membuka hutan untuk bercocok tanam/berkebun. Kenyataan di lapangan cukup banyak kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan perkebunan (Senoaji, 2010). Angka deforestasi sebesar 30.6 juta hektar (27.7%) dari 110.4 juta hektar Kawasan Hutan Tetap di Indonesia (Ditjen Planologi, 2013). Laju kerusakan hutan adalah sebesar 1.51 juta hektar per tahun (Sumargo *et al.*,

2011).Tingginya angka deforestasi umumnya disebabkan oleh konversi kawasan hutan menjadi areal non-kehutanan, perladangan dan perambahan hutan, serta terjadinya *illegal logging* (Subarna, 2011). Selain itu, kompleksitas kepentingan banyak pihak, termasuk masyarakat dapat memicu lahirnya konflik sosial antarpihak yang berkepentingan dalam penguasaan hutan (Maring, 2013). Permasalahan ini tidak dapat diatasi dengan meniadakan komponen yang dianggap mengancam (masyarakat), tetapi dapat diantisipasi dengan cara memperbaiki dan membangun hutan bersama-sama agar hutan menjadi tetap lestari dan bermanfaat (Sumanto, 2009).

Perhutanan sosial merupakan konsep yang telah diterima dan diakui sebagai salah satu pendekatan yang baik dalam rangka mencapai kelestarian hutan dan memberikan berbagai manfaat positif bagi masyarakat, termasuk juga masyarakat di luar wilayah program. Beberapa contoh program perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah adalah Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Desa Taba Padang dan Desa Air Selimang di Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu potret nyata desa yang berbatasan dengan hutan yang telah tersentuh Program Perhutanan Sosial berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) untuk Desa Taba Padang serta Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) untuk Desa Air Selimang. Sebagian besar wilayah kedua desa tersebut merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi strategis sebagai pengatur sistem tata air dan penyangga bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Sebagian areal hutan negara ini dirambah dan dikonversi menjadi lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh instansi yang membidangi kehutanan di Kabupaten Kepahiang menyebabkan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dari ancaman perambahan cukup sulit untuk dilaksanakan secara

intensif. Ancaman perambahan ini sangat mungkin akan meluas, mengingat 58.6% penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Kepahiang lapangan pekerjaan utamanya adalah di sektor pertanian dan membutuhkan lahan untuk aktifitas budidaya. Kondisi ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial berupa Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) serta Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi aspek pengelolaan Hutan Desa (HD) Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, dan (2) mengetahui hubungan antara kelembagaan dengan perilaku, performa, kinerja, serta sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada November 2019 di Desa Taba Padang dan Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti menggunakan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan tentang kelembagaan, perilaku, kinerja/performa dan sosial ekonomi pengelola Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah referensi, data-data, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan mereka yang ditunjuk sebagai sampel merupakan responden yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Jumlah sampel yang diambil

pada penelitian ini berjumlah 16 responden pada masing-masing Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sehingga total terdapat 32 responden.

Data hasil kuisisioner yang terkumpul selanjutnya ditabulasi dan dianalisis untuk mendapatkan ukuran evaluasi yang didasarkan pada *sistem skoring*, yaitu didasarkan pada bobot masing-masing aspek yang dibagi secara berimbang sesuai dengan

jumlah pertanyaan dalam kuesioner. Selanjutnya dihitung juga skala interval jawaban responden (Tabel 1), yang bertujuan untuk memudahkan interpretasi hasil dengan rumus :

$$\text{Skala Interval} = \frac{U-L}{K}$$

Dimana :

U = Skor tertinggi x jumlah pertanyaan

L = Skor terendah x jumlah pertanyaan

K = Jumlah Kelas Interval

Tabel 1. Skala Interval rata-rata jawaban responden

No.	Aspek Pengelolaan HKm	Jumlah Skor	Skala Interval Interval	Kriteria
1.	Kelembagaan	30	23,32-30,00	Baik
			16,66-23,31	Sedang
			10,00-16,65	Buruk
2.	Perilaku	24	18,66-24,00	Baik
			13,33-18,65	Sedang
			8,00-13,32	Buruk
3.	Kinerja/performa	42	32,66-42,00	Baik
			23,33-32,65	Sedang
			14,00-23,32	Buruk
4	Sosial Ekonomi	21	16,32-21,00	Baik
			11,66-16,33	Sedang
			7,00-11,66	Buruk

Analisis hubungan antar aspek pengelolaan perhutanan sosial dianalisis menggunakan Uji Korelasi Rank Spearman. Uji korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal dan tidak menentukan

prasyarat data terdistribusi normal. Uji Rank Spearman pada taraf kepercayaan 95% ($P < 0.05$). kedua variabel memiliki hubungan signifikan jika $P < 0,05$, namun jika $P > 0,05$ berarti tidak ada hubungan signifikan. Berikut rumus analisis korelasi tersebut (Sugiyono 2013) :

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum b_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

ρ = Koefisien Korelasi Rank Spearman

b_i = Ranking Data Variabel $X_i - Y_i$

n = Jumlah Responden

Kriteria tingkat hubungan koefisien korelasi antar variabel berkisar antara -1 sampai 1. Tanda positif dan negatif menunjukkan arah hubungan di antara

keduanya. Adapun untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi digunakan kriteria pedoman untuk koefisien korelasi yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria koefisien korelasi

Nilai	Makna
0,00-0,20	Hampir tidak ada korelasi
0,21-0,40	Rendah
0,41-0,60	Sedang
0,61-0,80	Tinggi
0,81-1,00	Sangat Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Aspek Pengelolaan Perhutanan Sosial

Aspek Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aspek kelembagaan pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung cenderung lebih baik daripada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang. Skor total aspek kelembagaan pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung adalah sebesar 28,625 yang tergolong baik, sedangkan skor total kelembagaan pada pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang adalah sebesar 22,938 yang tergolong sedang. Dari 10 pertanyaan yang diajukan terhadap pengelola HKm hanya 2 (dua) pertanyaan yang memiliki rata-rata skor sama dengan pengelola HD yaitu persyaratan menjadi anggota, sedangkan 8 (delapan) lainnya memiliki rata-rata skor

lebih rendah (Tabel 3). Hal tersebut dikarenakan pengelolaan HD dinaungi langsung oleh pihak pemerintahan desa, sedangkan pengelolaan HKm dibawah naungan Gapoktan. Adanya peran langsung pemerintah desa akan membuat mekanisme penyusunan dan aplikasi kelembagaan semakin baik. Hal tersebut didukung oleh berita yang diterbitkan oleh Liputan Indonesia (2017) bahwa pengelolaan Hutan Desa (HD) Depati Junjung merupakan juara tingkat nasional lomba Wana Lestari 2017 kategori kelompok masyarakat pengelola hutan desa. Hasil penelitian Djelau *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok tani hutan rakyat Desa Durjela termasuk dalam tingkat keberhasilan sedang karena aspek-aspek dalam kelembagaan dan pengelolaan lahan hutan rakyat belum sepenuhnya berhasil.

Tabel 3. Hasil tabulasi aspek kelembagaan pengelola Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Aspek Kelembagaan	Rata-Rata Skor	
	HD	HKm
1. Persyaratan menjadi anggota	3,000	3,000
2. Batasan keanggotaan	3,000	1,250
3. Struktur organisasi dan aturan main kelembagaan	3,000	2,438
4. Mekanisme pemberian sanksi	2,813	2,125
5. Mekanisme resolusi konflik	2,813	2,688
6. Aturan untuk mengubah atau membuat peraturan (aturan konstitusional LPHD/Gapoktan HKm)	2,625	2,375
7. Pengakuan dari pihak luar	3,000	3,000
8. Bimbingan dan penyuluhan	2,813	2,063
9. Kemudahan akses informasi, pasar, teknologi, dan permodalan	2,813	1,813
10. Efisiensi sumberdaya	2,750	2,188

Total	28,625	22,938
Kriteria	Baik	Sedang

Aspek Perilaku Pengelola

Secara umum aspek perilaku pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung cenderung lebih baik daripada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang. Skor total perilaku pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung adalah sebesar 22,813 yang tergolong baik, sedangkan skor total perilaku pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang adalah 18,563 yang tergolong sedang (Tabel 4). Lebih rendahnya skor aspek perilaku pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang dibandingkan pengelola Hutan Desa (HD)

Depati Junjung disebabkan faktor kelembagaan. Lebih rendahnya skor aspek kelembagaan pada pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang menyebabkan total skor aspek perilaku pengelolanya lebih rendah dibandingkan pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung. Menurut North (2012) dan Sukwika *et al.* (2016) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan suatu kegiatan, sangat ditentukan oleh aspek kelembagaan karena berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi.

Tabel 4. Hasil tabulasi aspek perilaku pengelola Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Aspek Perilaku Pengelola	Rata-Rata Skor	
	HD	HKm
1. Ketaatan terhadap aturan yang telah disepakati	3,000	2,938
2. Tidak membakar hutan	3,000	3,000
3. Hanya menebang pohon yang sudah memenuhi kriteria	3,000	2,625
4. Tidak menebang pohon yang berada di sekitar sumber mata air/daerah resapan air	3,000	2,875
5. Penanaman kembali pada pohon yang sudah ditebang	2,875	2,563
6. Tidak merambah hutan/ menebang pohon diluar garapan	2,813	1,875
7. Tidak memburu/mengambil flora dan fauna dilindungi	2,875	1,500
8. Tidak melakukan tindakan yang bisa merusak hutan	2,250	1,188
Total	22,813	18,563
Kriteria	Baik	Sedang

Aspek Kinerja/Performa Pengelola

Aspek kinerja/performa pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung cenderung lebih baik daripada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang. Skor total aspek kinerja/performa pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung adalah sebesar 36,25 yang tergolong baik, sedangkan skor total aspek kinerja/performa pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang adalah 31,19 yang tergolong sedang (Tabel 5). Hal ini dikarenakan aspek kelembagaan pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung cenderung lebih baik daripada

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang. Sub aspek kelembagaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja bimbingan dan penyuluhan. Sejalan dengan Sukwika *et al.* (2016) bahwa keberhasilan efektifitas kinerja kelembagaan dalam hutan rakyat adalah SDM penyuluh dan pendampingannya. McGinnis dan Ostrom, (2014) menambahkan bahwa peran penyuluh secara kelembagaan sangat strategis membantu petani hutan rakyat belajar bagaimana mendapatkan produktivitas yang lebih baik dari sistem yang dipraktekan petani.

Tabel 5. Hasil tabulasi aspek kinerja/performa pengelola Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Aspek Kinerja/Performa Pengelola	Rata-Rata Skor	
	HD	HKm
1. Mengerjakan pekerjaan dengan teliti	2,94	2,63
2. Pemahaman dan keterampilan dalam pekerjaan.	2,75	2,50
3. Pekerjaan selalu mencapai target yang telah ditentukan.	2,44	1,50
4. Pengaruh kemampuan dan keterampilan kerja terhadap kinerja.	2,13	1,88
5. Kuantitas kerja sesuai dengan standar kerja yang ditentukan	2,63	2,19
6. Kemampuan menyelesaikan dengan tepat dan cepat	2,69	2,56
7. Kemandirian dalam bekerja.	2,75	2,63
8. Kemampuan menggunakan fasilitas di tempat kerja	1,88	1,13
9. Kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi penunjang pekerjaan.	1,94	1,75
10. Pengetahuan teknis dan dasar teknis mengenai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab memberikan untuk menyelesaikan beban kerja	2,88	2,63
11. Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki dapat mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan.	2,81	2,50
12. Skill/keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan	2,69	2,13
13. Kepercayaan yang tinggi dari pengurus, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan pengurus kepada anggota meningkatkan kinerja anggota.	2,94	2,69
14. Kemampuan menghasilkan kinerja yang baik karena mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman.	2,81	2,50
Total	36,25	31,19
Kriteria	Baik	Sedang

Aspek Sosial Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor total aspek sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung cenderung lebih tinggi daripada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang walaupun sama-sama terkategori baik. Skor total aspek sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung adalah sebesar 20,69, sedangkan skor total aspek sosial ekonomi pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang adalah 19,50 (Tabel 6). Peningkatan aspek sosial dan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama

program perhutanan sosial merupakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi ekonomi adanya perhutanan sosial memberikan dampak positif. Hasil penelitian sejalan dengan Sanjaya *et al.* (2016) bahwa masyarakat mengupayakan pengelolaan di lahan mereka secara baik karena dengan adanya program HKm tersebut masyarakat secara langsung dapat memperoleh manfaatnya seperti adanya peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan produktivitas lahan, dan masyarakat dapat menjaga sistem ekologi hutan secara baik melalui kegiatan.

Tabel 6. Hasil tabulasi aspek sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Aspek Sosial Ekonomi	Rata-Rata Skor	
	HD	HKm
1. Kegiatan pengelolaan hutan sosial berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga	3,00	3,00
2. Program hutan sosial membentuk mata pencaharian baru	3,00	3,00
3. Adanya kelompok hutan sosial mampu menurunkan sengketa antar sesama anggota dalam pengelolaan areal	3,00	3,00

4. Ada dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan	3,00	3,00
5. Selalu memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti biaya izin usaha pemanfaatan dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	2,69	1,88
6. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran aturan yang telah disepakati	3,00	2,63
7. Kebutuhan rumah tangga tercukupi dari hasil pengelolaan hutan sosial	3,00	3,00
Total	20,69	19,50
Kriteria	Baik	Baik

Hubungan Aspek Pengelolaan Perhutanan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelembagaan pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang memiliki hubungan nyata dengan perilaku, performa/kinerja serta sosial ekonomi.

Aspek perilaku pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang memiliki hubungan nyata dengan aspek kelembagaan, performa/kinerja serta sosial ekonomi.

Aspek performa/kinerja pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang memiliki hubungan nyata dengan aspek kelembagaan, perilaku serta sosial ekonomi.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa keeratan hubungan

antar aspek pengelolaan perhutanan sosial pada HD lebih tinggi dibandingkan dengan HKm. Hal tersebut dikarenakan pengelola HD memiliki kelembagaan yang lebih baik dibandingkan dengan HKm. Oleh karena itu, semakin baik aspek kelembagaan maka semakin lengkap aturan-aturan, sehingga pengelola memiliki dasar yang lengkap dalam melakukan aktifitas di perhutanan sosial. Menurut Sukwita (2018) pengembangan kelembagaan hutan rakyat yang tepat dapat mewujudkan performa pengelolaan hutan yang baik. Pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan aksi kolektif lokal dapat berhasil melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya aturan main pengelolaan berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya aturan main dibuat secara partisipatif; adanya insentif ekonomi bagi pemilik dan pengguna; adanya instrumen pengendali penggunaan berkelanjutan.

Tabel 7. Hasil analisis korelasi hubungan antar aspek kelembagaan

Variabel	Kelembagaan	Perilaku Pengelola	Performa/Kinerja Pengelola	Sosial Ekonomi
HD				
Kelembagaan	1*			
Perilaku Pengelola	0,84*	1*		
Performa/Kinerja Pengelola	0,89*	0,82*	1*	
Sosial Ekonomi	0,87*	0,87*	0,84*	1*
HKm				
Kelembagaan	1*			
Perilaku Pengelola	0,47*	1*		
Performa/Kinerja Pengelola	0,79*	0,57*	1*	
Sosial Ekonomi	0,74*	0,47*	0,75*	1*

Ket : r tabel taraf 5% = 0,42, * = berhubungan nyata

KESIMPULAN

- 1 Aspek kelembagaan, perilaku, kinerja/performa, dan sosial ekonomi pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung memiliki kriteria baik, sedangkan pada pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang memiliki kriteria sedang, sedangkan aspek sosial ekonomi memiliki kriteria baik.
- 2 Terdapat hubungan yang nyata dengan pola linear positif antar aspek pengelolaan perhutanan sosial yang meliputi kelembagaan, perilaku, performa, kinerja, dan sosial ekonomi baik pada pengelola Hutan Desa (HD) Depati Junjung maupun Hutan Kemasyarakatan (HKm) Air Selimang.

Daftar Pustaka

- Cahyaningsih, Nurka. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat: panduan cara memproses ijin dan kiat sukses menghadapi evaluasi. Bogor: World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional Program.
- Cahyono E. 2012. Konflik kawasan konservasi dan kemiskinan struktural. *J Politika*. 8(1):7-41.
- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2007. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta (ID): Dephut.
- [Ditjen Planologi] Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. 2013. Statistik bidang planologi kehutanan tahun 2012. Jakarta (ID): Ditjen Planologi Kemenhut.
- Djelau, I., P.B.P. Panjaitan, dan T. Susdiyanti. 2014. Kajian kelembagaan terhadap keberhasilan kelompok tani hutan rakyat di Desa Durjela Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kepulauan Aru, Maluku. *Jurnal Nusa Sylva*, 14(1) : 44-54
- Johnson G, Scholes K, Whittington R. 2009. *Fundamentals of strategy*. London (UK): Prentice Hall, Financial Times.
- Maring P. 2013. Transformasi konflik menuju kolaborasi: kasus resolusi konflik penguasaan hutan. *J Insani*. 14(1):51-60.
- McGinnis, M. D., dan E. Ostrom. 2014. Social- ecological system framework: initial changes and continuing challenges. *Ecology and Society*, 19 (2) : 30-41
- North, D. C. 2012. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press
- Ruhimat, IS. 2009. Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7(3) :169-178.
- Sanjaya, R. 2016. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Santosa, A., H. Santoso., M.A.K, Sahide., Lisanawati, dan S. Alloy. 2011. Status Kehutanan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kehutanan Masyarakat*. 3(1) : 34-42.
- Sari, Y., G. Senoaji, dan H. Suhartoyo. 2019. Efektivitas program perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tanjung Alam Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. *Naturalis*, 8(1) : 87-98
- Senoaji. 2010. Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung

- Konak Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu. *Jurnal
Kehutanan*. 4(1) : 12-20.
- Subarna. 2011. Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *J Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 8(4): 265 – 275.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukwika, T., D. Darusman., C. Kusmana., dan D.R. Nurrochmat. 2016. Evaluating the level of sustainability of privately managed forest in Bogor, Indonesia. *Biodiversitas*, 17(1):241–248.
- Sukwika, T. 2018. Analisis aktor dalam perumusan model kelembagaan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(2)
- Sumanto SE. 2009. Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *J Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6(1):13-25.
- Sumargo W, Nanggara SG, Nainggolan FA, Apriani I. 2011. *Potret keadaan hutan Indonesia periode tahun 2000 - 2009*. Jakarta (ID): FWI.